



Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah

Fitri Angraini^{1*}, Sindi Rahayu², Desinta Bella Irwana³

¹⁻³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Indonesia

Email: anrainifitri123@gmail.com¹, sindirahayu0909@gmail.com², desintabellairwana21@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: anrainifitri123@gmail.com

Abstract. Local government budget management is a crucial element in regional governance, as it directly impacts accountability, transparency, and efficiency in public service delivery. To support effective regional financial management, the Indonesian Government has established the Government Internal Control System (SPIP), as stipulated in Government Regulation Number 60 of 2008. This study aims to examine the role and practical implementation of SPIP in regional budget management through a case study of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Dumai City. Using a qualitative case study approach, this study analyzes regional financial documents, audit reports from the Regional Audit Agency (BPKAD), as well as laws and regulations and internal policies governing SPIP implementation. The results indicate that SPIP has been implemented in BPKAD Dumai City throughout the budget management cycle, from planning and implementation to reporting and accountability. However, its implementation has not reached an optimal level due to constraints such as limited leadership commitment, inadequate human resource capacity, and suboptimal internal oversight mechanisms. Therefore, improving SPIP implementation is a strategic step to realize accountable, transparent, and performance-oriented regional financial governance.

Keywords: Accountability; Financial Management; Governance; Government Internal Control System; Regional Budget.

Abstrak. Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola daerah, karena secara langsung berdampak pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyampaian pelayanan publik. Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Studi ini bertujuan untuk meneliti peran dan implementasi praktis SPIP dalam pengelolaan anggaran daerah melalui studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, studi ini menganalisis dokumen keuangan daerah, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKAD), serta hukum dan peraturan dan kebijakan internal yang mengatur implementasi SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP telah diimplementasikan di BPKAD Kota Dumai sepanjang siklus pengelolaan anggaran, dari perencanaan dan implementasi hingga pelaporan dan akuntabilitas. Namun, implementasinya belum mencapai tingkat optimal karena kendala seperti komitmen kepemimpinan yang terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, dan mekanisme pengawasan internal yang suboptimal. Oleh karena itu, peningkatan implementasi SPIP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Kata kunci: Akuntabilitas; Anggaran Daerah; Pengelolaan Keuangan; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator fundamental untuk menilai kinerja dan kredibilitas administrasi pemerintahan daerah. Sejak implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD). Kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas lokal. Namun perluasan kewenangan fiskal juga meningkatkan kompleksitas dan risiko salah kelola dalam administrasi keuangan daerah (Setyaningrum et al., 2024)

Dalam praktik desentralisasi kewenangan fiskal tidak selalu disertai dengan kapasitas tata kelola yang memadai di tingkat daerah banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang lemah seringkali menyebabkan inefisiensi, penyimpangan anggaran, dan alokasi sumber daya publik yang suboptimal. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas kegiatan pemerintah. Penguatan mekanisme tata kelola dalam pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah (Farwitawati, 2021)

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten mengungkapkan masalah yang berulang dalam pengelolaan keuangan daerah. Isu-isu ini meliputi kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan pada regulasi yang berlaku. Temuan tersebut menyoroti bahwa kekurangan pengendalian internal tetap menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang buruk di tingkat pemerintah daerah. Penguatan sistem pengendalian internal sangat penting guna memastikan keterbukaan, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan-tujuan ini meliputi keberhasilan dalam administrasi pemerintahan, akurasi anggaran, perlindungan aset-aset negara kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. SPIP terdiri atas lima unsur yang berhubungan satu sama lain: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pengawasan terhadap pengendalian internal. Komponen-komponen ini membentuk sistem terintegrasi yang secara efektif mendukung pembentukan tata kelola keuangan berkualitas tinggi.

Di luar peran pengawasannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai instrumen manajerial yang membantu para pemimpin pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara akuntabel. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, inefisiensi, dan salah alokasi dana, sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memainkan peran strategis dalam mempromosikan tata kelola yang baik dan penganggaran berbasis kinerja di pemerintahan daerah.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia menunjukkan tingkat kematangan yang bervariasi. Sementara beberapa daerah telah berhasil melembagakan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses manajemen anggaran, daerah lain terus menghadapi hambatan struktural, kelembagaan, dan budaya. Tantangan ini meliputi komitmen kepemimpinan yang terbatas, kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, praktik manajemen risiko yang tidak memadai, dan peran unit audit internal yang optimal.

Berdasarkan analisis mendalam tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam mengelola anggaran pemerintah daerah sangat penting. Melalui pendekatan tinjauan pustaka studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, implementasi, dan tantangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam manajemen pendapatan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik dari segi teori maupun praktik, dengan berfungsi sebagai referensi bagi para pembuat kebijakan dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menyediakan jaminan memadai terhadap pencapaian sasaran organisasi. Sasaran penerapan SPIP mencakup efektivitas serta efisiensi operasional, keakuratan data audit, perlindungan aset-aset negara, dan ketaatan terhadap regulasi. SPIP terdiri dari lima komponen pokok, yaitu: 1) Lingkungan pengendalian, yang merefleksikan integritas dan nilai-nilai etika di kalangan aparatur pemerintah. 2) Penilaian risiko, yang melibatkan identifikasi serta analisis risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. 3) Kegiatan pengendalian, yang mencakup kebijakan dan prosedur untuk memastikan pelaksanaan keputusan secara efektif. 4) Informasi dan komunikasi, yang memastikan tersedianya data relevan serta penyebarannya secara tepat waktu. 5) Pemantauan pengendalian internal, yang meliputi evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian.

Penerapan SPIP yang baik memperkuat integritas organisasi publik dan meminimalisir risiko penyimpangan, terutama pada level pengelolaan anggaran daerah, tanpa sistem pengendalian internal yang kuat, pemerintah daerah rentan terhadap inefisiensi, penyimpangan anggaran, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan (Matondang et al., 2025).

Dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah, SPIP memainkan peran penting karena prosesnya mencakup tahapan yang kompleks, mulai dari perencanaan anggaran, implementasi, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Keberadaan SPIP menjadi mekanisme utama guna menjamin hasil audit anggaran berjalan sesuai dengan prinsip (*good governance*). Tanpa sistem pengendalian internal yang memadai, pemerintah daerah berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti inefisiensi anggaran, penyimpangan administrasi keuangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Indika, 2021).

Penerapan SPIP dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah dilakukan melalui unsur-unsur yang saling terhubung yaitu lingkungan pengendalian penilaian risiko kegiatan. Dari lima unsur tersebut membentuk suatu sistem yang terintegrasi dengan tujuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan pada pengelolaan anggaran daerah. Penerapan lingkungan pengendalian yang efektif mencerminkan integritas serta nilai etika aparatur pemerintah sementara penilaian risiko yang buruk dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengawasan informasi dan komunikasi serta pemantauan berfungsi memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dan dievaluasi secara berkesinambungan. Penerapan SPIP yang optimal terbukti mampu memperkuat integritas organisasi publik serta menekan risiko terjadinya penyimpangan khususnya dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah (Matondang et al., 2025).

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sebuah proses menyeluruh yang melibatkan tindakan dari pimpinan dan seluruh karyawan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara terlindungi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan (A & Permana, 2024).

Lebih lanjut SPIP memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kematangan penerapan SPIP berhubungan dengan opini hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK.

Pemerintah daerah yang telah menerapkan SPIP pada tingkat kematangan yang baik cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP atas laporan keuangan yang disusunnya (Darmawan, 2025). Selain itu SPIP berperan penting dalam mencegah praktik kecurangan (fraud) melalui penerapan kegiatan pengendalian dan pemantauan internal yang konsisten (Harianja, Simanullang, 2023). SPIP juga mendorong transparansi serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik, sehingga memperkuat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Setyo Widodo & Yandi, 2022). SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal, tetapi juga sebagai alat manajemen strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP dalam pengelolaan anggaran daerah di satuan entitas pemerintah daerah secara khusus yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai.

Penelitian ini menitikberatkan pada serangkaian proses pengelolaan anggaran daerah, yang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban anggaran. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu data pendukung diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui kajian mendalam terhadap kesesuaian antara praktik pengelolaan anggaran daerah dengan komponen-komponen SPIP. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan SPIP dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian serta analisis mendalam terkait implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai. Analisis secara khusus menyoroti lima komponen utama SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pemantauan. Penyusunan hasil kajian dan pembahasan dilakukan secara terintegrasi untuk memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap temuan-temuan tersebut, sehingga analisis dapat dikembangkan dengan keterkaitan yang erat antar elemen.

Lingkungan Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Dumai memiliki tugas pokok dan fungsi, pembagian tugas dan wewenang yang formal, serta kebijakan internal yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Secara struktural, kondisi ini telah mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan mencerminkan adanya upaya penerapan lingkungan pengendalian sesuai dengan ketentuan SPIP.

Efektivitas lingkungan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tupoksi dan kebijakan formal tapi juga oleh komitmen pimpinan dan budaya organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai integritas, etika, dan disiplin kerja aparatur belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di BPKAD Kota Dumai masih memerlukan penguatan, terutama dalam penegakan aturan dan keteladanan pimpinan. Hal ini sesuai terhadap pandangan (Jatmiko et al., 2022) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan dan budaya integritas merupakan faktor kunci dalam efektivitas pengendalian internal.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pimpinan memiliki peran strategis sebagai teladan utama dalam menanamkan nilai akuntabilitas dan transparansi. Apabila komitmen pimpinan terhadap penerapan SPIP belum optimal, maka struktur organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan berpotensi hanya bersifat administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap pencegahan penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan lingkungan pengendalian di BPKAD Kota Dumai perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan, pembinaan etika aparatur, serta pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan .

Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian risiko dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Dumai telah dilakukan secara implisit dalam proses pengelolaan keuangan, yang diawali perencanaan, implementasi , hingga akuntabilitas. Aparatur pada umumnya telah memahami berbagai potensi risiko, seperti keterlambatan pelaporan keuangan dan kesalahan administrasi.

Proses penilaian risiko tersebut belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk peta risiko atau risk register kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen risiko masih bersifat reaktif, yaitu identifikasi risiko dilakukan setelah permasalahan muncul, bukan sebagai langkah

antisipatif dalam perencanaan. Temuan ini sejalan dengan (Amudo, A., & Inanga, 2009) yang menyatakan bahwa lemahnya dokumentasi risiko menyebabkan pengendalian internal sulit dievaluasi secara berkelanjutan.

Ketiadaan risk register yang terintegrasi berpotensi menghambat efektivitas pengendalian internal, khususnya dalam memitigasi risiko keterlambatan penyerapan anggaran, ketidaktepatan pelaporan, serta penyimpangan administrasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen risiko yang terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah menjadi langkah strategis bagi BPKAD Kota Dumai untuk meningkatkan efektivitas unsur penilaian risiko dalam penerapan SPIP.

Kegiatan Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian di BPKAD Kota Dumai telah dilaksanakan melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP), mekanisme verifikasi dokumen keuangan, serta pemisahan fungsi antar bidang. Pemisahan fungsi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan anggaran menunjukkan adanya upaya pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan administrasi.

Meskipun demikian efektivitas kegiatan pengendalian masih mengalami tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban kerja aparatur. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengendalian dan meningkatkan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Temuan ini berhubungan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah (Sofiati, 2021)

Oleh karena itu peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan serta penataan beban kerja menjadi faktor penting dalam memperkuat kegiatan pengendalian di BPKAD Kota Dumai agar penerapan SPIP dapat berjalan lebih efektif.

Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Dumai telah memanfaatkan sistem informasi keuangan daerah sebagai sarana utama dalam mendukung pengelolaan anggaran. Pemanfaatan sistem ini membantu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyajian data keuangan daerah.

Namun demikian, masih ditemukan hambatan dalam proses komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah, terutama terkait keterlambatan penyampaian data pendukung dan perbedaan format pelaporan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan proses konsolidasi laporan keuangan serta menyulitkan proses verifikasi dan rekonsiliasi data. Temuan ini

memperkuat pendapat (Prabawati, Rahayu, 2017) bahwa efektivitas sistem informasi tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan koordinasi antar organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas unsur informasi dan komunikasi, BPKAD Kota Dumai perlu mengembangkan mekanisme pertukaran data yang terjadwal, seragam, dan berbasis sistem informasi terpadu. Selain itu, peningkatan literasi digital dan disiplin komunikasi administratif aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan anggaran daerah.

Pemantauan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan penerapan SPIP di BPKAD Kota Dumai telah dilakukan melalui pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fungsi pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal serta memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.

Meskipun fungsi pemantauan telah berjalan, tindak lanjut atas temuan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Kurangnya tindak lanjut tersebut berpotensi mengurangi efektivitas SPIP secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sofyani & Akbar, 2015) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kota Dumai, optimalisasi fungsi pemantauan SPIP menjadi semakin penting mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penetapan mekanisme pengendalian tindak lanjut yang lebih tegas agar penerapan SPIP di BPKAD Kota Dumai dapat berjalan secara efektif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan SPIP di BPKAD Kota Dumai

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap lima unsur SPIP, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di BPKAD Kota Dumai sebagaimana disajikan pada tabel berikut (Natita et al., 2024):

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat.

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Peningkatan akuntabilitas SPIP berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dengan adanya sistem pengendalian yang baik transparansi di bertanggung jawab dalam penggunaan dana dapat ditingkatkan sehingga mengurangi potensi terjadinya kecurangan.	Keterbatasan sumber daya dan kompetensi Banyaknya instansi pemerintahan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan SPIP secara efektif keterbatasan ini dapat menghambat pelaksanaan pengendalian intern yang optimal.
Peningkatan efektivitas operasional Sistem pengendalian intern berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara teratur serta menjamin data audit keuangan.	Konflik kepentingan Dalam konteks teori agensi terdapat potensi konflik kepentingan antara pihak yang memberikan otoritas atau Principal dan pihak yang menerima otoritas atau agen agen mungkin lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka yang dapat mengarah pada tindakan fraud.
Pengendalian internal dan monitoring yang optimal Penerapan SPIP yang efektif mampu mengurangi permasalahan kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan sehingga semakin optimal	Kurangnya komitmen dari pimpinan Jika pimpinan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan sistem pengendalian intern maka sistem ini tidak akan berjalan dengan efektif

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan penelitian terkait implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah di Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Dumai, dapat ditarik kesimpulan bahwa SPIP telah diintegrasikan secara menyeluruh dalam mengelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Implementasi ini menunjukkan bahwa SPIP telah menjadi elemen fundamental dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang secara efektif mendukung pencapaian transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Ditinjau dari lima unsur SPIP, lingkungan pengendalian di BPKAD Kota Dumai secara struktural telah terbentuk melalui kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta kebijakan internal yang mendukung pengelolaan keuangan daerah. Namun efektivitas penerapannya masih belum optimal akibat lemahnya komitmen pimpinan dalam menanamkan nilai integritas dan etika kerja aparatur. Penilaian risiko telah dilakukan dalam praktik, tetapi belum terdokumentasi secara sistematis sehingga pengelolaan risiko masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran.

Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan melalui penerapan prosedur operasional standar, mekanisme verifikasi dokumen, dan pemisahan fungsi antar unit kerja. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah membantu proses pelaporan meskipun koordinasi antar

perangkat daerah belum berjalan optimal. Sementara itu pemantauan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan tetapi tindak lanjut hasil pengawasan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di BPKAD Kota Dumai masih memerlukan penguatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar BPKAD Kota Dumai memperkuat komitmen pimpinan dalam penerapan SPIP melalui peningkatan keteladanan dan pembinaan budaya integritas aparatur. Selain itu perlu dilakukan pengembangan manajemen risiko yang terdokumentasi secara sistematis, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi keuangan dan koordinasi antar perangkat daerah. Penguatan fungsi pemantauan dan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan internal juga perlu ditingkatkan agar penerapan SPIP dapat berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjaatkan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Dumai BPKAD Wilayah Dumai serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa data dan dukungan Penghargaan dan terima kasih juga penulis haturkan kepada dosen pembimbing keluarga serta sahabat atas bimbingan doa dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini

DAFTAR REFERENSI

- A, M. N., & Permana, I. (2024). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(8), 2410–2419. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2749>
- Amudo, A., & Inanga, E. L. (2009). Evaluation of internal control systems: A case study from Uganda. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Darmawan, M. I. (2015). ANALISIS PENGARUH BIROKRASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERAS. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Farwitawati, R. (2021). *Informasi Akuntansi Dan Akuntabilitas Terhadap*.
- Harianja, Simanullang, & R. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://repository.upm.ac.id/1199/>

- Indika, M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 167–187. <https://doi.org/10.25170/jak.v14i2.1116>
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). *J r a k*. 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.22143>
- Matondang, K. A., Lubis, Z. H., Fajri, M. Y., Bella, S., & Simanungkalit, B. M. (2025). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 466–372. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5798>
- Natita, R. K., Setiawan, A., & Djajadikerta, H. (2024). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 6(1), 97–107.
- Prabawati, Rahayu, K. (2017). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 1–215. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Setyo Widodo, D., & Yandi, A. (2022). Model Kinerja Karyawan: Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi, (Literature Review MSDM). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.1>
- Sofiati, E. (2021). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Pegawai. *Ekono Insentif*, 15(1), 34–46. <https://doi.org/10.36787/jei.v15i1.502>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja : *Jaai*, 19(2), 153–173.